ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks : Google Scholar, Moraref, Base, OneSearch.

MULTIKULTURALISME DI INDONESIA: RELEVANSI PANCASILA, ISLAM, DAN KEBANGSAAN

Astuti Nursangadah[1], Putri Fauziatul Fitrah[2], Suci Agustiningsih[3],
Fauziya Nailil Husna[4], Umi Khoirun Ni'mah[5]
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Putri1800031195@webmail.uad.ac.id

Abstract

The Indonesian nation is full of religious, social, political and cultural diversity, as well as various others. All the diversity that exists in Indonesia makes this nation called a nation of multiculturalism. Islam has formed a unity in line with human history of more than 15 centuries that have passed. Islamic theology almost never contradicts the validity of culture, except for something that is contrary to human values. Islam also justifies the principle of multiculturalism in accordance with what is contained in the Qur'an. Thus, the events of Islam in Indonesia spread very swiftly and widely. As for the problems that occur in Indonesia, such as Islamic doctrinalism, it is in line with traditional cultural values in Indonesia. The largest Muslim country in the world is Indonesia, which has a distinctive social, cultural, political, linguistic and religious diversity. However, the diversity in Indonesia does not diminish unity and is still able to maintain the integrity of the country. Indonesia has an ideology that people believe in until now, namely Pancasila. There are 5 main values stated in Pancasila, that these values undeniably contain Islamic social values in multiculturalism, manifested by the integration of diversity in the form of (NKRI) or the "Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Keywords: *Islam, Multiculturalisme, Pancasila, Indonesia*

Abstrak : Bangsa Indonesia penuh dengan keragaman agama, sosial, politik dan budaya, serta berbagai macam lainnya. Segala keragaman yang ada di Indonesia menjadikan bangsa ini disebut sebagai bangsa multikulturalisme. Islam telah membentuk satu kesatuan sejalan dengan sejarah manusia lebih dari 15 abad yang telah berlalu. Teologi Islam hampir tidak pernah bertentangan dengan validitas budaya, kecuali sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam juga menghalalkan prinsip multikulturalisme sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, peristiwa Islam di Indonesia menyebar dengan sangat cepat dan luas. Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti doktrinalisme Islam, sejalan dengan nilai-nilai budaya tradisional di Indonesia. Negara Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, politik, bahasa dan agama yang khas. Namun, keragaman di Indonesia tidak mengurangi persatuan dan tetap mampu menjaga keutuhan negara. Indonesia memiliki ideologi yang diyakini

masyarakat hingga saat ini, yaitu Pancasila. Ada 5 nilai utama yang terkandung dalam Pancasila, bahwa nilai-nilai tersebut tidak dapat disangkal mengandung nilai-nilai sosial Islam dalam multikulturalisme, yang diwujudkan dengan integrasi kebhinekaan dalam bentuk (NKRI) atau "Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kata Kunci: Islam, Multikulturalisme, Pancasila, Indonesia

PENDAHULUAN

Islam dalam menyikapi keragaman tradisi telah mampu berintegrasi dari sebuah peradaban sosial budaya ke dalam kelompok masyarakat yang beragama atau sering disebut dengan istilah "ummah". Ada teori-teori yang diyakini berasal dari kenabian permanen sebagai ciri suatu agama. Selain itu, tradisi dan budaya yang diyakini oleh sebagian masyarakat Muslim dibawa ke dalam ummat dan tidak sekedar diislamkan. Hampir semua nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat multikultural. Islam selalu mampu beradaptasi dan bersatu dalam bentuk ummat yang ada dan tidak menang tetapi dapat hidup berdampingan dengan keragaman budaya masyarakat setempat. Kenyataannya, sejauh mana penilaian oleh berbagai kalangan terkait peradaban Islam tentunya merupakan konstruksi ketimbang multikultural, sebuah temuan dualistik normatif dan historis. Itulah sebabnya Islam memiliki pengalaman dari berbagai tradisi agama lain yang secara normatif mampu diterima dari berbagai aspek sosial, karena ajarannya bersifat egaliter dan humanistik. Seluruh masyarakat di Indonesia hampir tidak mengalami kesulitan dan tidak ada konflik untuk menerima awal proses Islamisasi yang dibawa oleh para saudagar dari berbagai negara seperti Arab, Persia, India, China dalam waktu yang relatif singkat. Satu hal yang membuat Islam pasti melekat dan secara spiritual mendominasi penduduk Indonesia. Islam Indonesia tentu terwujud dalam situasi multikultural, di mana secara keseluruhan tidak ada konflik atau kontradiksi sedikit pun. Berbagai bahasa, adat, tradisi, budaya, nilai-nilai sosial, bahkan agama disatukan dalam kehidupan beragama dengan ciri khas yang sulit dipecahkan. Dengan demikian, bangsa Indonesia kemudian dapat mengabadikannya dalam "Pancasila" sebagai identitas bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis pustaka dengan koleksi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah secara sistematis pada artikel-artikel jurnal dan dokumen yang membahasa secara signifikan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. Konteks yang menjadi objek penelitian ini adalah studi kasus di Indonesia, maka data-data yang berkaitan erat dengan bagaimana multikulturalisme di Indonesia dan relevansinya pada aspek Pancasila, Islam, serta Kebangsaan yang dapat dianalisis secara mendalam. Selanjutnya setelah dilakukan proses pengumpulan data dan analisis, maka peneliti memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Multikulturalisme

Pancasila dianggap sebagai multikulturalisme organik. Istilah "multikulturalisme organik" bertujuan untuk memperjelas bahwa proses integrasi Indonesia masih merupakan hal yang wajar hingga saat ini. Dalam banyak hal, multikulturalisme sebenarnya identik dengan integrasi ketika ada konsensus yang jelas dalam masyarakat atau negara untuk mengakui keragaman budaya masyarakat, baik budaya, sosial atau politik.(Muñoz, 1999) Berkaitan dengan Pancasila, saya menggunakan istilah "integrasi politik". Pancasila sebagai falsafah dan idealisme nasional, menurut Weiner, karena merupakan hasil kompromi politik yang menyatukan dua hal yaitu asimilasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Asimilasi berarti mengubah budaya etnis yang dominan suatu negara menjadi budaya suatu negara. Penyatuan kebhinekaan (bhineka Tunggal ika) berarti loyalitas nasional dibangun tanpa mengesampingkan budaya etnis minoritas.(Sjamsuddin, 1989)

Hefner bahkan mengakui bahwa bentuk multikulturalisme yang lebih representatif datang dari beberapa negara baru di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Proses pembentukan negara benar-benar wajar jika negara-negara tersebut dapat menampung banyak kelompok budaya

dan etnis yang berbeda tanpa pembentukan budaya historis sebelumnya atau melalui kerangka yang disepakati secara institusional. Multikulturalisme secara alami terjadi di ketiga negara ini tanpa perlu mengekspresikan dirinya dalam bentuk "kehendak sosial" yang digambarkan sebagai wujud nyata dari komunitas multikultural. Di Indonesia, prinsip pluralisme secara ideologis terkait dengan nilai-nilai Pancasila, dan proses integrasi sosial secara jelas diungkapkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, ia membentuk multikulturalisme organik dan konstitusi negara. Setelah Indonesia diakui sebagai negara berdaulat, para pemimpin nasional akan berkumpul untuk menentukan konsep negara mana yang sesuai untuk negara baru dengan entitas budaya, bahasa, ras, dan agama yang begitu beragam. Karena Indonesia adalah perwakilan Islam terbesar di dunia, tidak mengherankan jika perdebatan tentang bentuk pemerintahan semakin diprakarsai oleh perjuangan antara Islam dan ide-ide sekuler. Wacana negara Islam, setidaknya bernuansa agama, sering diintensifkan dalam forum-forum diskusi yang mempersoalkan bentuk negara dan pemerintahan. Jika rumusan istilah negara tidak dapat menerjemahkan realitas multikultural yang telah diakui dan diterima selama berabad-abad menjadi wilayah yang terintegrasi dan bersama, maka bangsa yang baru lahir itu rawan runtuh.Babak baru, yang kemudian disepakati bersama dalam bentuk multikulturalisme organik, adalah diadopsinya rumusan dasar kebangsaan dan kebangsaan yang termuat dalam lima sila yang disebut Pancasila. Ide pokok edisi ini muncul dari pidato bisu pemimpin Gerakan Kemerdekaan Sukarno di hadapan Panitia Persiapan Gerakan Kemerdekaan, yang disebut Kahin sebagai filosofi sosial dewasa para pemimpin nasionalis terpenting Indonesia(Kahin, 1995). Sukarno dengan jelas menghubungkan gagasan besar antara apa yang ditangkap oleh pikiran para pemimpin terdidik dan ekspresi linguistik simbolis yang dirangkum dari gagasan publik yang tidak berpendidikan. Kahin menyimpulkan bahwa ini adalah contoh integrasi demokrasi Barat, pemikiran Islam modernis, Marxis, dan ide-ide demokrasi dan komunis yang berasal dari desa dan membentuk gagasan padi Pancasila yang dominan. Bertentangan dengan pandangan Kahin, Yamin, seorang transnasionalis dan tokoh kunci dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, mengatakan bahwa Pancasila Sukarno murni

digali dari identitas multikultural negara, seperti yang dijelaskan dalam Negara Keltagama ini.Oleh Empu Prapanca, Kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478M), seorang penyair istana saat itu, mengatakan bahwa itu berasal dari ide lokal. Sukarno, menurut Yamin, mengambil alih tema Pancasila Prapanka dan memberinya isi dan makna baru(Maarif, 1985). Dibandingkan dengan pendekatan rasional dan empiris Kahin, Sukarno meminjam istilah Pancasila dari sumber lokal yang penuh nilai budaya, bahkan suasana logo-sentris karakter asli negara Indonesia daripada perintah.Dengan pemikiran itu, pendekatan Yamin memiliki diwariskan agar rumusan Pancasila lebih dapat diterima. Prinsip pertama yang dikemukakan oleh Sukarno dalam perumusan Pancasila adalah nasionalisme. Ini adalah gagasan baru tentang kebangsaan multikultural yang dikaitkan dengan prinsip kesetaraan dalam perjuangan politik. Dalam sambutannya, "Nasionalisme bukanlah sekelompok orang yang hidup dengan "Le Desir de Tor Ensemble" di daerah-daerah kecil seperti Minangkabau, Madura, Yoga, Sunda dan Bugis, tetapi semua orang Indonesia. Saya jelaskan itu. Menurut geopolitik Allah swt ditakdirkan untuk hidup dalam kesatuan seluruh pulau di Indonesia, dari ujung utara Sumatera sampai Irian! ... era Sriwijaya dan Majapahit"(Kahin, 1995). Sukarno tampak berhati-hati dalam menjelaskan konsep nasionalisme, yang sering ditangkap dalam bentuk "Chauvinisme" dalam tradisi politik Barat. Ia melanjutkan nasionalisme berdasarkan itu untuk menggali nilai-nilai multikultural. Sebagai warisan peradaban nusantara yang tumbuh secara organik, membentuk dan mengubah dengan memaksakan nilai-nilai budaya dari luar Itu tidak mungkin. Nasionalisme telah menjadi fokus utama pemikiran Sukarno tentang Pancasila, tetapi lima prinsip dasar yang diajukan telah dipersempit menjadi satu prinsip (Ekasila) dengan istilah "Gotong royong", dan nasionalisme Indonesia tetap ada.Sangat berharga. Gagasan nasionalisme Soekarno melalui pidatonya dalam Pancasila, menurut saya, merupakan inti dari Sirara berikutnya yang ia kembangkan. Konsep nasionalisme Sukarno unik karena secara umum tidak mengenal definisi nasionalisme Barat yang masih dianggap sempit dan sektarian. Misalnya, ia menolak definisi Ernest Renan tentang nasionalisme sebagai "kehendak untuk bersatu" (*le Desire d'etre ensemble*) dan bertentangan dengan Otto Bauer, yang menggambarkan nasionalisme sebagai karakter yang muncul dari

penyatuan nasib. Sukarno melangkah lebih jauh dengan menggabungkan unsur "rakyat" sebagai penggerak perubahan dengan unsur "tempat" di mana orang Indonesia hidup dalam realitas berbagai tradisi dan budaya. "Jika Anda melihat peta dunia, Anda dapat melihat di mana" penyatuan "itu. Satuan gerombolan pulau bisa ditampilkan di peta," jelas Soekarno lebih khas prinsip nasionalisme dalam asumsi nilai-nilai multikultural yang mengakar di nusantara.

B. Islam Sebagai Suatu Peradaban Multikultural

Islam sudah pasti mengakui adanya prinsip multikultural yang sudah ada, prinsip tersebut dapat di definisikan sebagai "adanya penerimaan atas perbedaan bahasa, ras, agama dan budaya dalam suatu komunitas social" (Alim, 2019). Hal tersebut terbukti dalam sebuah pengertian yaitu "Islam" yang "Ketundukan" tanpa adanya perlawanan (*inqad bi duni al-muqawamah*). Menurut bahasa kata Islam berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Jadi, Islam pada dasarnya memiliki tujuan agar manusia selalu hidup rukun serta damai antara satu dengan lainnya dan tanpa adanya pertikaian. Samsul Rizal dalam tulisannya tentang Islam dan Multikulturalisme menjelaskan mengenai gambaran Islam tentang multikulturalisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu multikulturalisme dan komunitas Muslim (Multikulturalisme Internal) dan komunitas agama-agama lain (Multikulturalisme eksternal). Indonesia memiliki keberagaman, diantaranya seperti agama, suku, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu tidak heran jika Indonesia terjadi banyak konflik karena keberagaman tersebut. Tetapi jika kita mampu mengatasi perbedaan dengan baik, maka perbedaan itu tidak akan menjadi alasan adanya konflik justru sebaliknya. Salah satu keberagaman yang akan di bahas yaitu terfokus pada agama, terutama agama Islam. Agama Islam hadir sebagai penunjuk arah kepada umat muslim untuk tidak salah langkah dalam menjalani hidup. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, ras, suku, bahasa dan agama. Dengan demikian rentan terjadi konflik, sehingga kita perlu berhati-hati dalam menaggapi sebuah perbedaan yang ada di negara kita. Apabila kita mampu mengelola perbedaan dengan baik, maka konflik dapat teratasi, sebaliknya apabila perbedaan tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik(UJAN, 2011). Islam dan multikulturalisme sudah

membentuk suatu komunitas yang harmonis dan damai, menjalin serta membangun sebuah komunitas yang religious sehingga membentuk peradaban Islam yang berasal dari latar belakang tradisi masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, juga mampu berintegrasi melalui politik yang akan bergabung dalam suatu komunitas multukultural dengan ikatan-ikatan iman yang melampaui batas-batas keagamaan mereka. Adapun pandangan mengenai Islam dan multikulturalisme, atas dasar jaringan relasi antar tradisi yang dibedakan oleh antropolog Robert Redfield "tradisi besar" dan "tradisi kecil" dalam sejarah yang ada di dalam agama Islam. Tradisi besar yaitu melalui literatur-literatur, kesusastraan, sehingga membentuk suatu peradaban, sedangkan tradisi kecil terdiri dari suku-suku, desa-desa yang ada di pedalaman, serta masyarakat perkotaan, berproses melalui organisasi social yang mana tiap kelompok masyarakat mampu melakukannya sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah dalam berbagai konteks kehidupan dan lingkungan sekitar yang berbeda-beda(Martin, 1982).

C. Kebangsaan dan Multikulturalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebangsaan adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Contoh: korban pesawat yang terbakar itu sudah diketahui kebangsaannya. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang multikultural. Negara harus berangkat dari kepentingan seluruh elemen warga-negara yang multikultural. Jika kekuatan sektarian dan promordial itu dibiarkan berlarut-larut, maka bukan hanya saja mengancam, namun juga dapat membinasakan karakter negara-bangsa Indonesia yang multikultural, secara lebih jauh mungkin Indonesia akan mengalami suatu kolaps sosial-kebangsaan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa berbagai kerusuhan yang merebak di banyak tempat merupakan akibat dari rendahnya kesadaran dan wawasan multikulturalisme. Memahami demokrasi yang benar menjadi hal yang penting bagi kita semua, Seperti yang kita saksikan

bersama, dewasa ini terjadi krisis sosial budaya yang muncul dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi ditengah masyarakat kita. Seperti, disintegrasi sosial-politik yang bersumber pada euforia kebebasan; lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba serta penyakit-penyakit sosial lain; dan berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bernuansa politis, etnis, dan agama. Sejarah menunjukkan bahwa kebangsaan merupakan faktor utama lahirnya kesadaran untuk merdeka. Selain itu juga sekaligus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan(Vonk, 2012). Kebangsaan mengantarkan bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Munculnya kebangsaan nasional merupakan masa lahir dan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai gerakan yang bersejarah, kesadaran tumbuh dan bersemi dari yang sifatnya samar-samar, kecil dan terpisah-pisah, berkembang menjadi suatu gerakan yang jelas arah dan tujuannya, besar, menyatu, dan menyeluruh. Meskipun perbedaan dan konflik sering terjadi dan tidak dapat dihindari karena perbedaan kepentingan. Namun dalam tataran tertentu perbedaan-perbedaan itu diakui sebagai dinamika dan kreativitas politik yang dapat mendorong dalam peningkatan demokratisasi. Kelahiran serta perkembangan kebangsaan Indonesia mempunyai corak tersendiri, yang tentunya berbeda dengan kebangsaan sebagaimana yang tumbuh di negara lain seperti negara Eropa. Paham kebangsaan Indonesia tidak berkonotasi etnis, tetapi tetap mengakui kemajemukan yang ada dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 diakui sebagai awal kebangkitan nasional yang terbentang dalam kurun waktu yang cukup panjang dan diisi dengan karya-karya masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menemukan, menumbuhkan sekaligus mengaktualisasikan paham kebangsaan untuk membangun jati diri dan identitasnya dalam sejarah umat manusia. Sebagai suatu gerakan, Budi Utomo memusatkan gerakan dan usahanya di bidang budaya, khususnya pendidikan. Gerakan ini telah mendorong lahir dan berkembangnya partai-partai politik maupun organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Sejak masa

kemerdekaan hingga dewasa ini, dapat dipandang sebagai proses pengembangan kebangsaan, suatu jaman pengaktualisasian konsep kebangsaan yang memberikan kebebasan untuk berkembang dan memilih sesuatu yang sesuai kebutuhan. Hal ini akan menimbulkan keanekaragaman dalam wujud pengaktualisasian kebangsaan itu, dengan membuat pilihan-pilihan format politik yang diikuti dengan perubahan bentuk pemerintahan. Pengalaman sejarah dalam kurun waktu yang cukup panjang, memperlihatkan bahwa persatuan adalah unsur mutlak untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pembentukan negara federal yang mulai hangat dibicarakan akhir-akhir, jika dipandang secara historis kultural, tidak memilki dasar pembenaran yang relevan. Permasalahan yang dialami bangsa Indonesia saat ini, yang sangat kompleks, dan dalam tataran tertentu sangat rumit dan mendasar memerlukan pemecahan yang arif dan bijak, dari sekedar merubah bentuk negara kesatuan menjadi federalisme. Oleh karena itu, cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dengan penegakkan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru itu adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" yang dibagun dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, sehingga akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Sebagai ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan. Hal ini dilakukan karena dibutuhkannya sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya merupakan sumbangan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

D. Arus Multikuturaslisme di Indonesia.

1. Multikultarisme dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia

Jika ditilik secara etimologis, makna multikulturalisme adalah sebuah paham ataupun keyakinan tentang adanya banyak budaya dan kebudayaan di suatu tempat. Multikulturalismne menekankan adanya kesederajatan dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya yang saling berdampingan. Pandangan multikulturalisme bermanfaat untuk mengetahui bagaimana struktur sosial menciptakan dan menjaga budaya-budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Menurut Azra, sebagaimana dikutip oleh Abidin, multikulturalisme mulanya merupakan sebuah gagasan dan pandangan yang kemudian bertransformasi dalam bentuk kebijakan dalam kebudayaan yang memuat adanya unsur penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.(Abidin, 2016)

Munculnya masyarakat yang multikultural dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: letak dan keadaan geografis, adanya pengaruh kebudayaan asing, terjadi perkawinan campur antar suku maupun etnis yang berbeda serta iklim yang berbeda-beda antar satu tempat dengan tempat lainnya.(Abidin, 2016) Dilihat dari letak dan keadaan geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kurang lebih 17.000 pulau yang membentang dari timur ke barat. Banyaknya pulau di Indonesia tentu menyebabkan perbedaan budaya antar pulau/daerah satu dengan yang lainnya. Sebab, sebelum sarana transportasi mengalami kemajuan dan perkembangan seperti sekarang, masyarakat antar pulau/daerah tidak dapat leluasa berinteraksi langsung secara terus menerus dan membuat karakteristik dan ciri khas bagi tiap penduduk dengan tempat tinggal berbeda. Ciri

khas yang sudah menjadi jati diri tiap penduduk pada tiap daerah yang berbeda menjadi cikal bakal tumbuhnya masyarakat multikultural di Indonesia.

Indonesia memiliki sekitar 300 suku, 200 bahasa daerah dan ribuan aspirasi kultural, maka dalam interaksi sosial dituntut untuk bersikap toleran.(Agustianty, 2021) Keberagaman tersebut menunjukkan realitas masyarakat Indonesia yang multikultural. Realitas masyarakat multikultural ini tercatat sebagai bagian dari multikulturalisme di Indonesia. Bentuk multikulturalisme awal yang memiliki peran besar dalam perkembangan multikulturalisme di Indonesia adalah Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Kitab Sutasoma ditulis semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke -14. Kitab tersebut memuat konsep toleransi dalam kehidupan beragama. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, pemeluk agama Hindu dan Buddha hidup secara berdampingan. Meskipun agama Hindu dan Buddha merupakan dua substansi yang berbeda, perbedaan tersebut tidak memunculkan perpecahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kitab Sutasoma bait 5 pupuh 139. Pada bait tersebut, terdapat penggalan istilah "Bhinneka Tunggal Ika" yang bermakna berbeda-beda tetapi satu jua. Istilah "bhinneka tunggal ika" yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan pada masa kerajaan Majapahit di kemudian hari diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia.(Pursika, 2009)

Peristiwa besar lain yang menunjukkan perjalanan multikulturalisme di Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang diadakan pada 28 Oktober 1828. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan fenomena multikulturalisme yang sangat berpengaruh. Berbagai organisasi pemuda dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia seperti Jong Java, Jong Soematranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemoeda Kaoem Betawi, perwakilan kaum Tionghoa dan Arab dan lain sebagainya, berkumpul Bersama dalam satu tempat untuk merumuskan suatu rumusan yang dapat mengintegrasikan mereka dengan perbedaan latar belakang. Lalu, konsep 'satu nusa, satu bangsa, satu tanah air' menjadikan pemersatu antar golongan pemuda yang multikultural tersebut.(Saihu, 2018)

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia juga menunjukkan semangat multikulturalsime di Indonesia. Perumusan Pancasila sendiri terjadi dalam kurun waktu dua bulan lamanya. Dimulai dari diadakannya sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Soekarno dalam pidatonya. Dalam perumusan Pancasila, pandangan dan gagasan setiap tokoh yang berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda menjadi pertimbangan yang sangat krusial. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila di sahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Multikulralisme secara resmi menjadi bagian dari konsep dan pandangan hidup warga negara Indonesia pada tahun 1951. Yakni dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi semboyan warga negara Indonesia yang multikultural untuk mewujudkan toleransi antar suku, agama, ras dan golongan. Semboyan itu dilukiskan di bawah lambing negara Indonesia yang dikenal dengan nama Garuda Pancasila.

2. Multikulturalisme dalam Pendidikan Indonesia.

Tunas-tunas kemajemukan di Indonesia selain disebabkan oleh faktor geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, juga disebabkan oleh hubungan Indonesia dengan negeri-negeri di luar Indonesia. Indonesia, yang saat itu masih bernama nusantara menjadi daerah yang sangat menjanjikan dalam hal perdagangan dan sumber daya alam. Sejak akhir masa prasejarah di nusantara, telah ditemukan kontak antara masyarakat nusantara dengan pendatang. Yang mana kontak tersebut sangat erat kaitannya dengan perdagangan. Bangsa-bangsa yang pernah datang ke Indonesia dan mengadakan perdagangan di Indonesia antara lain bangsa China, India, bangsa-bangsa Arab, dan bangsa Eropa. Dalam interaksi tersebut, terjadilah akulturasi dan asimilasi budaya.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam proses pertemuan kebudayaan yang berbeda tersebut. Banyak pendatang yang mengajarkan

pengetahuan baru kepada masyarakat Nusantara, diantaranya tentang kepercayaan. Masyarakat nusantara yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme diperkenalkan dengan kepercayaan-kepercayaan baru. Kepercayaan tersebut diantaranya adalah agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh pendatang India dan China, agama Islam yang dibawa oleh bangsa-bangsa Arab, agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa, serta keyakinan lain yang tidak sebanyak ketiga kepercayaan tersebut.

Agama Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia juga diajarkan dan disebarluaskan dengan pengajaran dan pendidikan. Upaya pembinaan keagamaan mulai tumbuh dari masyarakat bawah. Ulama-ulama Islam dengan berbagai strategi mencoba menyebarluaskan agama Islam. Ada yang berdakwah dan mengajarkan agama Islam di pusat-pusat pemerintahan, ada yang masuk ke desa-desa terpencil dan berdakwah disana melalui semacam pesantren, muenasah, dan surau sehingga Islam terus berjalan di masyarakat. (Rahman, 2015) Masyarakat Indonesia yang tertarik belajar agama Islam datang ke dari penjuru-penjuru daerah ke pesantren dengan membawa kebudayaan mereka masing-masnig dari daerah asalnya. Sehingga, bisa juga dikatakan bahwa pesantren selain merupakan tempat mendalami agama Islam, tetapi juga merupakan tempat tumbunhya multikukturalisme. Pesantren di Indonesia telah merepresentasikan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, menerima modernitas, dan menjadi gambaran identitas Muslim Indonesia. (Rahman, 2015)

Sampai saat ini, pesantren masih menjadi tempat yang mendukung multikulturalisme. Hal ini karena pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, merupakan lembaga pendidikan berwajah ramah yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan harmonis.(Rahman, 2015) Kedua nilai tersebut menjadi kunci utama terbentuknya masyarakat multikultural yang harmonis dan toleran.

3. Tantangan dan Permasalahan Multikuluralisme yang terjadi di Indonesia.

Adanya masyarakat plural dan multikultural merupakan fenomena masyarakat moderen. Pluralitas dan multikuturalitas merupakan realitas serta *sunnatullah* yang harus diterima adanya.(Noor, 2020) Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang multikultural sangat kaya akan kemajemukan. Namun kemajemukan pada masyarakat multikultural di Indonesia seringkali menjadi penyebab konflik SARA (suku, ras, agama dan antar golongan). Diantara konflik multikutural yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tragedi Sampit, konflik Maluku, dan konflik 1998. Yang mana, konflik-konflik tersebut terjadi karena kurangnya toleransi dan semangat multikulturalisme.

Dalam mewujudkan terciptanya masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari yaitu primordialisme, etnosenterisme, diskriminatif dan streotipe. Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan, dimana masyarakat golongan menganggap bahwa suku mereka adalah yang terbaik dari golongan lain. Etnosenterisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain karena mengangap bahwa kebudayaanya lebih baik dengan menggunakan ukuran budaya sendiri. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Streotipe adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat.

Untuk itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemudian masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural dan membangun Indonesia yang multikultural. Pertama, menyebarkan konsep multikulturalisme secara luas dan memahamkan akan pentingnya multikulturalisme bagi bangsa Indonesia, serta mendorong keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Kedua, membentuk kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna

multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya. Ketiga, berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

KESIMPULAN

Pancasila dianggap sebagai multikulturalisme organik. Istilah «multikulturalisme organik» bertujuan untuk memperjelas bahwa proses integrasi Indonesia masih merupakan hal yang wajar hingga saat ini. Dalam banyak hal, multikulturalisme sebenarnya identik dengan integrasi ketika ada konsensus yang jelas dalam masyarakat atau negara untuk mengakui keragaman budaya masyarakat, baik budaya, sosial atau politik. Berkaitan dengan Pancasila, saya menggunakan istilah «integrasi politik». Pancasila sebagai falsafah dan idealisme nasional, menurut Weiner, karena merupakan hasil kompromi politik yang menyatukan dua hal yaitu asimilasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Asimilasi berarti mengubah budaya etnis yang dominan suatu negara menjadi budaya suatu negara. Penyatuan kebhinekaan berarti loyalitas nasional dibangun tanpa mengesampingkan budaya etnis minoritas. Hefner bahkan mengakui bahwa bentuk multikulturalisme yang lebih representatif datang dari beberapa negara baru di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Proses pembentukan negara benar-benar wajar jika negara-negara tersebut dapat menampung banyak kelompok budaya dan etnis yang berbeda tanpa pembentukan budaya historis sebelumnya atau melalui kerangka yang disepakati secara institusional. Multikulturalisme secara alami terjadi di ketiga negara ini tanpa perlu mengekspresikan dirinya dalam bentuk «kehendak sosial» yang digambarkan sebagai wujud nyata dari komunitas multikultural. Di Indonesia, prinsip pluralisme secara ideologis terkait dengan nilai-nilai Pancasila, dan proses integrasi sosial secara jelas diungkapkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Jika ditilik secara etimologis, makna multikulturalisme adalah sebuah paham ataupun keyakinan tentang adanya banyak budaya dan kebudayaan di suatu tempat. Multikulturalismne menekankan adanya kesederajatan dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya yang saling berdampingan. Pandangan multikulturalisme bermanfaat untuk mengetahui bagaimana struktur sosial menciptakan dan menjaga

budaya-budaya yang berbeda dalam suatumasyarakat. Menurut Azra, sebagaimana dikutip oleh Abidin, multikulturalisme mulanya merupakan sebuah gagasan dan pandangan yang kemudian bertransformasi dalam bentuk kebijakan dalam kebudayaan yang memuat adanya unsur penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Munculnya masyarakat yang multikultural dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: letak dan keadaan geografis, adanya pengaruh kebudayaan asing, terjadi perkawinan campur antar suku maupun etnis yang berbeda serta iklim yang berbeda-beda antar satu tempat dengan tempat lainnya. Dilihat dari letak dan keadaan geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kurang lebih 17.000 pulau yang membentang dari timur ke barat.

DAFTAR PUSAKA

Rahman, A., & Nuryana, Z. (2019, August 25). Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. https://doi.org/10.5281/zenodo.3376797

Abidin, Z. (2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Dinamika Global*, *1*(02), 123–140. https://doi.org/10.36859/jdg.v1i02.24

Agustianty, E. F. (2021). *MULTIKULTURALISME DI INDONESIA*. osf.io. https://osf.io/preprints/tejgv/

Alim, S. (2019). *Islam , Multikulturalisme , dan Pancasila*. *23*(2), 85–99.

Kahin, G. M. T. (1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. *Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press Dan Sinar …*.

Maarif, A. S. (1985). Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan. *Jakarta: LP3ES*.

Martin, R. C. (1982). *Islam, a cultural perspective*. ixtheo.de. https://ixtheo.de/Record/1618050982

Muñoz, G. M. (1999). *Islam, modernism and the west: cultural and political relations at the end of the millennium*. ixtheo.de. https://ixtheo.de/Record/243674619

Noor, T. R. (2020). Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3952

Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik Terhadap Semboyan" Bhinneka Tunggal Ika". *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPP/article/view/1726

Rahman, A. (2015). Paradigma Kritis Pancasila dalam Dimensi Pendidikan Islam A . Pendahuluan Pancasila didengungkan sebagai ideologi bangsa sampai saat ini

sangat memprihatinkan . Lebih dari separuh abad memerdekakan diri dari belenggu penjajahan kemudian berdirilah negara. *Jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *10*(1), 125–144.

Saihu, S. (2018). Pendidikan Islam Multikulturalisme. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*. http://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/8

Sjamsuddin, N. (1989). *Integrasi politik di Indonesia*. library.stik-ptik.ac.id. http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=21352%5C&lokasi=lokal

UJAN, A. A. D. (2011). *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. Indeks.

Vonk, O. (2012). *Dual nationality in the European Union: A study on changing norms in public and private international law and in the municipal laws of four EU member states*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=GTYzAQAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR3%5C&dq=vonk%5C&ots=TcLt-vvnEN%5C&sig=0ttsx1kVwEYMpVC1hHCjJC1U_F4